

## Dewas KPK Tentukan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Pekan Depan

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menentukan kelanjutan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Nonaktif, Firli Bahuri, pekan depan.

Diketahui Firli telah memenuhi pemanggilan Dewas KPK pada Selasa 5 Februari 2023, terkait pertemuannya dengan Eks Menteri RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Rencana pemeriksaan pendahuluan awal minggu depan, akan diputuskan lanjut sidang atau tidak," kata Anggota Dewas KPK, Syamsudin Haris saat dihubungi wartawan, Rabu (6/12).

Pemeriksaan pendahuluan untuk menilai cukup atau tidak bukti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri. Sidang etik akan dilanjutkan bila cukup bukti, jika sebaliknya maka kasus berpotensi dihentikan.

"Pemeriksaan pendahuluan adalah rapat tertutup lima orang anggota Dewas yang akan menilai apakah cukup bukti ter-

jadinya dugaan pelanggaran kode etik oleh terlapor. Jika mayoritas Dewas menilai cukup bukti maka diputuskan untuk dilanjutkan ke sidang etik. Sebaliknya jika tidak cukup bukti maka kasus dihentikan," ujarnya.

Sebelumnya, Firli Bahuri memenuhi panggilan Dewas pada Selasa (5/12). Firli akan diklarifikasi lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran kode etik terkait pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli Bahuri tiba pukul 09.36 WIB. Dia datang dengan menggunakan kemeja putih dan celana hitam. Setiba di Gedung Dewas KPK, tak banyak pernyataan yang disampaikan. Ia menegaskan keahliannya itu untuk memenuhi panggilan Dewas KPK.

"Saya datang memenuhi panggilan dewas ya, nanti saya sampaikan setelah itu ya," ujar Firli kepada wartawan. ● han

## Sertijab Pangdivif 1 Kostrad dan Kapoksahli Pangkostrad

JAKARTA (IM) - Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang masih merangkap sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad), memimpin serah terima jabatan (sertijab) Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 1 Kostrad dan Kepala Kempokop Staf Ahli (Kapoksahli) Pangkostrad.

Upacara sertijab itu digelar di Executive Lounge, Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Jabatan Pangdivif 1 Kostrad diserahkan dari Mayjen Bobby Rinal Makmun kepada Brigjen Rudi Puruwito yang sebelumnya menjabat Wakil Asisten Personel KSAD. Bobby kemudian akan menjabat sebagai Komandan Secapa TNI AD.

Lalu, jabatan Kapoksahli Pangkostrad diserahkan dari Brigjen Kus Arisena kepada Brigjen Budi Kusworo yang sebelumnya menjabat Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro. Selanjutnya, Kus Arisena akan mengemban amanah sebagai Staf Khusus KSAD.

Dalam amanatnya, KSAD Maruli mengatakan jika serah terima jabatan

ini merupakan dinamika organisasi yang berkaitan dengan pembinaan personel dan satuan. Hal ini bertujuan sebagai kaderisasi, kinerja, dan produktivitas satuan serta pengembangan karier perwira yang bersangkutan.

"Saya percaya, bekal kemampuan dan pengalaman jabatan sebelumnya, akan mampu melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya," kata Maruli dalam siaran pers Penerangan Kostrad, Rabu (6/12).

Maruli juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi Bobby dan Kus Arisena selama menjabat.

"Semoga pengalaman selama bertugas di satuan Kostrad dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas di tempat yang baru," ujar Maruli.

Perlu diketahui bahwa KSAD Maruli masih merangkap sebagai Pangkostrad. Hal ini karena Mayjen Muhammad Saleh Mustafa, yang saat ini menjabat Kepala Staf Kostrad, belum melaksanakan serah terima jabatan Pangkostrad. ● han

## Orang Kepercayaan Ungkap Persembunyian Fredy Pratama

BANDARLAMPUNG (IM) - Gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama saat ini disebut bersembunyi di wilayah Thailand.

Keberadaan gembong narkoba ini diungkap orang kerpercayaannya, Muhammad Rivaldo Miliandri G Silondae alias Kif, saat bersaksi di persidangan terhadap Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Andri Gustami di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (4/12).

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, Jaka Penuntut Umum (JPU) Eka Aftarini menghadirkan tiga saksi yakni Fajar Reskianto, Kif dan Hendi Ginanjar.

Di hadapan Majelis Hakim, Kif mengaku sering berkomunikasi dengan Fredy

Pratama melalui BBM saat masih berada di Indonesia.

Kif menambahkan, setelah menjadi orang kepercayaan Fredy Pratama, dirinya diperintahkan mengatur distribusi narkoba jenis sabu dari Malaysia.

"Disuruh ke Malaysia saya sama Fredy Pratama dan selama komunikasi kami baru bertemu sekali di Malaysia," kata dia.

Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan menanyakan soal keberadaan Fredy Pratama saat ini kepada Kif. "Sekarang berada di Thailand," tegas Kif menjawab pertanyaan Hakim Lingga.

Selanjutnya Kif berdalih tidak mengetahui dari mana Fredy Pratama mendapatkan puluhan kilogram sabu yang kerap dia kirim melalui kurir tersebut. Tugasnya hanya mendistribusikan barang haram tersebut sampai menyebrang ke Pulau Jawa.

"Saya enggak tahu dari mana, setelah di-packing saya bertugas mencari orang untuk mendistribusikannya," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan AKP Andri Gustami disebut menjadi kurir spesial dalam jaringan Narkoba Internasional Fredy Pratama. Dalam perannya, Andri Gustami sudah meloloskan sekitar 150 kilogram sabu dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. ● mci

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## KPU BERTEMU AMNESTY INTERNATIONAL

Anggota KPU August Mellaz (kempat kanan) berfoto bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (kelima kanan) dan aktivis Amnesty International Indonesia sebelum melakukan pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (6/12). Dalam pertemuan tersebut Amnesty International Indonesia mengusulkan beberapa topik penting kasus hak asasi manusia kepada KPU untuk dibawa dalam debat capres dan cawapres.

# UU ITE yang Baru Dipastikan Lindungi Masyarakat di Ruang Digital

Perubahan UU ITE yang kedua didasarkan pada upaya memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

JAKARTA (IM) - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) resmi disahkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan, pengesahan rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten-

tang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Hal ini juga dilakukan sesuai untuk memenuhi kebutuhan dan keadilan di masyarakat.

"Perubahan UU ITE didasarkan pada upaya memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis,

agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum," kata Budi Arie dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (6/12).

Seperti diketahui bahwa UU ITE telah mengalami dua kali perubahan sejak diundangkan. Pertama, perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menunjukkan dinamika dan keinginan masyarakat akan adanya penyempurnaan pasal-pasal UU ITE, khususnya akan ketentuan pidana konten ilegal.

"Delapan tahun sejak perubahan pertama, masih ada kebutuhan penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum,

baik secara nasional maupun global," ujar Bydu Arie.

Pada perubahan kedua, Budi Arie menekankan arti penting dalam mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat.

"Dinamika pembahasan tersebut memperkaya dan menghasilkan substansi RUU Perubahan Kedua UU ITE ke arah yang jauh lebih progresif dan komprehensif. Semua pembahasan ditujukan untuk memperkuat kebijakan nasional, untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat luas," katanya.

RUU Perubahan Kedua UU ITE disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR RI melalui Surat Nomor R-58/PRES/12/2023 tanggal 16 Desember 2021. Dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) guna mendapatkan persetujuan bersama.

Pembahasan RUU Perubahan Kedua UU ITE dilakukan melalui 14 (empat belas) kali Rapat Panitia Kerja (Panja) antara Pemerintah dengan Komisi I DPR RI. Selanjutnya, Panja Pembahasan RUU menugaskan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) agar seluruh rumusan substansi RUU, termasuk penjelasannya disempurnakan dan disinkronisasi berdasarkan teknis penulisan perundang-undangan dan kaidah Bahasa Indonesia yang baik.

Pada 21 November 2023, Panja Pembahasan RUU menyetujui laporan dari Timus dan Timsin RUU. Komisi I DPR RI dan Pemerintah kemudian menggelar Rapat Kerja pada 22 November 2023 dalam rangka Pemb-

caran Tingkat I, dan telah menyetujui naskah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II Sidang Paripurna untuk disahkan.

Berdasarkan Rapat Panja serta Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati perubahan 14 pasal eksisting dan penambahan 5 pasal RUU Perubahan Kedua UU ITE.

Berikut adalah beberapa norma pasal yang disempurnakan, di antaranya adalah mengenai alat bukti elektronik (Pasal 5), sertifikasi elektronik (Pasal 13), transaksi elektronik (Pasal 17), perbuatan yang dilarang (Pasal 27, Pasal 27 (a), Pasal 27 (b), Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidana (Pasal 45, Pasal 45 (a) dan Pasal 45 (b)), peran pemerintah (Pasal 40), dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 43).

Perubahan kedua UU ITE juga melengkapi materi yang meliputi identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Pasal 13 (a)), perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 16 (a) dan Pasal 16 (b)), kontrak elektronik internasional (Pasal 18 (a)), serta peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif (Pasal 40 (a)). ● han

## Cawapres Mahfud MD Janji Tingkatkan Kesejahteraan Guru Ngaji hingga Ustad

JAKARTA (IM) - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD sebut bahwa saat ini umat muslim di Indonesia tengah berkembang pesat. Meski agama Islam lahir di Mekah, namun tumbuh subur di Nusantara.

Mahfud MD mengatakan hal ini saat bersilaturohmat dengan para ulama dan habib se-DKI Jakarta di iNews Tower, Jakarta, Selasa (5/12).

Ulama dan habib yang hadir di antaranya KH. Husni Mubarak, Kiai Luthfi dari Forum Betawi Rembug (FBR), KH. Imam Pituduh, KH. Fahmi Amrullah Hadziq dari Tebuireng, Gus Rofuiddin, hingga Habib Abdul Khoir Al Haddad.

"Majelis taklim, di desa-desa hingga kota. Punya majelis ilmu di mana-mana. Islam secara sosial, amat bagus di sini. Ada pesantren, dan macam-macam," ucap Mahfud.

Para takmir juga mengelola masjid di Indonesia dengan sangat baik, begitu pun dengan pondok pesantren. Karena itu, Mahfud menyebut, pihaknya punya banyak program untuk pesantren, Dewan Kesejahteraan Masjid, dan ustad-ustad guru ngaji.

"Kita akan teruskan kebijakan yang sudah ada. Ada UU Pesantren dan Hari Santri Nasional. Itu melengkapi mozaik ke-Indonesiaan kita. Dan bentuk pengakuan peran santri dan pesantren. Kita akan berikan perhatian lebih," katanya.

Menurutnya, guru ngaji, marbot hingga ustad harus mendapatkan honorarium yang layak.

"Sekarang gaji guru ngaji rata-rata Rp200 ribu, enam bulan baru dibayar. Ada yang bahkan hanya Rp75 ribu," imbuhnya.

Di Aceh, kata Mahfud, marbot dan guru ngaji bahkan tidak mendapatkan digaji namun mereka tetap tekun mengabdikan diri.

nyebut, jumlah marbot dan guru ngaji di Aceh sekitar 1.500 orang yang 65 persennya tidak punya pekerjaan tetap. Sisanya petani dan pedagang. Pendapatannya jauh di bawah UMR.

"Alhamdulillah kita punya dana. Jumlahnya Rp128 triliun. Tinggal gimana ngaturinya untuk kesejahteraan guru dan ustad," ungkapnya.

Mahfud mengatakan, bersama Ganjar Pranowo, pihaknya bakal meningkatkan bantuan pesantren yang lebih adil dan merata, khususnya pesantren yang kecil-kecil.

"Ini akan kita atur kembali. Program penyetaraan untuk guru-guru madrasah. Penyetaraan institusinya dan guru-gurunya. Sudah ada, tapi strateginya harus diperbaiki. Supaya guru madrasah yang disertifikasi tetap bertugas di madrasah di pesantren, supaya tidak pergi ke pendidikan negeri," paparnya. ● mci



PELEPASAN SATGAS MARITIME TASK FORCE KONGA XXVIII-O/UNIFIL Sejumlah personel TNI AL yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force (MTF) KONGA XXVIII-O/UNIFIL TA 2023 melakukan penghormatan sebelum diberangkatkan ke Koarmada II, Surabaya, Jatim, Rabu (6/12). TNI AL memberangkatkan KRI Diponegoro-365 dengan membawa 120 personel terdiri dari 105 ABK, sembilan kru helikopter dan enam personel pendukung ke Lebanon untuk melaksanakan misi perdamaian dunia.

### PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan pembubaran PT KIRANA CITRA CAKRAWALA (Dalam Likuidasi) berdasarkan Neraca untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 tercatat Kewajiban, Ekuitas dan Aset akan menjadi beban para pemegang saham untuk bagian yang sama besarnya.

Jakarta, 7 Desember 2023  
Likuidator PT KIRANA CITRA CAKRAWALA (Dalam Likuidasi)

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERMADANI KHATULISTIWA NUSANTARA ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Desember 2023  
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai  
Tempat : Rajawali Place Lantai 25, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B/4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910.

Dengan Agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan konversi utang Perseroan menjadi Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan.
2. Persetujuan peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan.
3. Hal lain-lain.

Catatan:

1. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPS Luar Biasa adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal Pemanggilan RUPS Luar Biasa ini.
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPS Luar Biasa dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dan memberikan suara atas namanya dalam RUPS Luar Biasa dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari Para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS Luar Biasa, namun dengan ketentuan bahwa suara yang dikeluarkan oleh mereka selaku kuasa tidak dapat dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan/kuorum dalam RUPS Luar Biasa.
3. Salinan Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan paling lambat pada tanggal RUPS Luar Biasa.
4. Asli Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham Perseroan tersebut dan salinan kartu tanda pengenal dari kuasanya yang sah harus telah diserahkan kepada Perseroan sebelum kuasa tersebut hadir dalam RUPS Luar Biasa.
5. Demi terselenggaranya RUPS Luar Biasa secara efisien dan teratur, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan dimohon untuk hadir di tempat rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Luar Biasa dimulai.

Jakarta, 07 Desember 2023  
PT PERMADANI KHATULISTIWA NUSANTARA  
Direksi